

Perjanjian kerjasama militer GSOMIA merupakan sebuah prosedur yang memudahkan bagi kedua Negara untuk berbagi informasi intelijen yang berkaitan dengan aktifitas nuklir Korea Utara. Adanya perjanjian ini tidak akan memunculkan saling kecurigaan bahwa suatu Negara berusaha menahan informasi tertentu dari Negara lain karena perjanjian tersebut tidak menyebutkan bahwa Negara anggota nyawa jib membagikan segala bentuk informasi mengenai program nuklir Korea Selatan. Selain itu, kerjasamanya juga memberikan kemudahan bagi Korea Selatan untuk mendapatkan akses ke informasi yang dikumpulkan satelit intelijen Jepang. Peningkatan ancaman militer dari Korea Utara telah memberikan kontribusi terhadap pembahasan perjanjian GSOMIA Korea Selatan dengan Jepang. Namun dalam proses penandatanganan perjanjian GSOMIA, dibawah kepemimpinan presiden Lee Myung Bak, Korea Selatan melakukan penundaan sebanyak 2 kali. Penundaan tersebut terjadi dua kali yaitu pada bulan Mei dan Juni tahun 2012. Kegagalan kesepakatan dari perjanjian GSOMIA dengan Jepang disebabkan oleh beberapa faktor baik itu internal dan eksternal. Bagi Korea Selatan, faktor internal yang menyebabkan kegagalan ini yaitu; anti Jepang di Korea Selatan. Selain faktor internal, terdapat juga faktor eksternal yang membuat kegagalan penandatanganan perjanjian GSOMIA Korea Selatan dengan Jepang. Pertama, dikarenakan belum terselesaikannya sengketa wilayah antara Korea Selatan dan Jepang tentang kepemilikan pulau Dokdo/ Takeshima. Sengketa pulau Dokdo telah dimulai sejak abad ke 17. Klaim oleh Jepang atas pulau Dokdo dianggap sebagai legalitas kejahatan Jepang selama pendudukan. Bagi Korea Selatan, Pulau Dokdo dianggap sebagai simbol kedaulatan negara tersebut. Peranan Kepulauan Dokdo yang hanya memiliki luas keseluruhan 186.121 km<sup>2</sup> dan hanya memiliki 2 pulau utama dengan jarak kurang lebih 89 km dari daerah pantai Ullengdo, tidak hanya sebagai objek wisata semata-mata seperti yang terlihat sedang digalang oleh pemerintah Korea Selatan. Pada sisi lainnya, Jepang memiliki kepentingan atas pulau Dokdo dikarenakan masih dianggap berada di dalam kedaulatan Jepang. Secara strategis, Jepang bias menempatkan pangkalan militernya di kepulauan tersebut. Sehingga Jepang mampu mengawasi kekuatan militer negara-negara tetangga seperti Rusia dan Tiongkok dari timur jauh. Selain itu juga Jepang mampu melakukan latihan militer di sekitar perairan pulau Dokdo